

# Fungsi Pengawasan Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Sorong Barat Kota Sorong

Joseph E. Lopulalan<sup>1</sup>, Aram Palilu<sup>2</sup>

Universitas Victory Sorong  
Email: [josephlopulalan@gmail.com](mailto:josephlopulalan@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan Tujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh para pimpinan di lingkup Kantor distrik Sorong Barat Kota Sorong yang meliputi Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Seksi terhadap kinerja pegawai dibawah wewenangnya guna mewujudkan visi Distrik Sorong Barat yaitu : Terwujudnya Masyarakat Yang Damai dan Maju. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana materi teliti yang berupa pengawasan Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Seksi merupakan pemimpin yang melakukan pengawasan kepada jenjang pegawai yang tepat berada dibawahnya secara penjenjang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengawasan pimpinan pada Kantor Distrik Sorong Barat merupakan bentuk Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pemimpin sesuai struktur organisasi yang dianut, dilakukan secara berkelanjutan dan berfungsi sebagai upaya kontrol yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas diri, kemampuan, dan kinerja pribadi baik bagi pimpinan sebagai pengawas maupun pegawai sebagai pihak yang diawasi maupun pekerjaan sebagai materi awasan yang secara organisasional telah mempengaruhi kinerja organisasi secara positif.

Kata Kunci: Fungsi pengawasan, pimpinan

## *Leadership Supervision Function on Employee Performance at the West Sorong District Office, Sorong City*

### *Abstract*

*This research was conducted with the aim of knowing the supervisory function carried out by the leaders in the Sorong Barat District Office of Sorong City which includes the District Head, District Secretary, Heads of Sub-Sections and Heads of Sections on the performance of employees under their authority in order to realize the vision of West Sorong District. namely: The Realization of a Peaceful and Advanced Society. The research method used in this study is a qualitative research method with a qualitative descriptive approach where the careful material in the form of supervision of the District Head, District Secretary, Heads of Sub-Sections and Heads of Sections is the leader who supervises the appropriate level of employees under him on a regular basis. tier. The results of this study conclude that leadership supervision at the West Sorong District Office is a form of Inherent Supervision carried out by leaders according to the organizational structure adopted, carried out continuously and serves as a control effort that has a positive impact on increasing self-capacity, abilities, and personal performance for both leaders as supervisors and employees as supervised parties and work as supervisory material which organizationally has positively affected organizational performance.*

*Keywords:* supervisory function, leadership

## 1. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh aktor-aktor yang menjalankan pemerintahan tersebut. Kepala Negara adalah pucuk pimpinan yang memberikan komando

bagi terlaksananya pemerintahan, namun jalannya pemerintahan sendiri sangat tergantung pada aparat pemerintah yang melaksanakan komando pimpinan Negara tersebut. Hal ini menunjuk pada fungsi eksekutor yang dimiliki oleh pemerintah yang sepenuhnya berada pada

pundak aparat pemerintahan. Pada titik inilah kinerja aparat pemerintah sangat menentukan berhasil tidaknya pemerintahan yang sementara diselenggarakan. Keberhasilan pemerintahan sendiri merupakan pengejawantahan dari segala aksi pencapaian tujuan pemerintahan tersebut.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Bangsa Indonesia, kuasaan mutlak berada di tangan rakyat, karenanya rezim yang berkuasa harus dapat mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada rakyat yang berdaulat. Pertanggungjawaban inilah yang menuntut kinerja aparat pemerintahan yang efektif dan efisien. Guna memastikan efektivitas dan efisiensi yang dicapai melalui kinerja aparat pemerintah maka perlu sekali diterapkan suatu sistem penjamin mutu pemerintahan secara internal pemerintah yang dijalankan oleh suatu badan atau lembaga khusus. Namun dalam tatanan organisasi yang tersusun secara sistematis maka pengawasan langsung berada di pundak setiap pimpinan yang memiliki wewenang berdasarkan jabatan yang diembankan dalam membawahi sejumlah aparat pemerintah yang berada dalam wewenangnya.

Dalam ulasannya mengenai pengawasan, Siagian (2011:114) menalarkan pengawasan sebagai alat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerja pemerintahan. Pengawasan bukanlah tujuan melainkan alat untuk memastikan pemerintahan dapat mencapai tujuan. Pengawasan merupakan sarana membimbing dan mengoreksi kesalahan dan meminimalisir penyimpangan. Sesuai dengan pendapat Manulang (2008:178), bahwa pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung antara pengawas kepada aparat pemerintah yang diawasi. Maka bertolak dari rangkaian pemikiran itulah dapat disimpulkan bahwa pimpinan langsung dari suatu unit kerja merupakan pengawas yang sangat efektif dalam melakukan pengawasan karena pimpinan pada jenjang ini dapat langsung mengamati proses kerja yang ditampilkan oleh aparat pemerintah yang tepat berada dibawahnya oleh wewenang jabatan yang dimilikinya.

Distrik atau Kecamatan merupakan jenjang pemerintahan Tingkat III dari suatu Pemerintah Daerah yang dalam tata organisasinya sesuai tingkatan wewenang memiliki tiga tingkatan pimpinan yaitu Kepala Distrik yang menjadi pucuk pimpinan di distrik, kemudian Kepala Sub Bagian sebagai pimpinan bagi sub-sub bagian yang ada di distrik dan Kepala Seksi yang mengepalai satu seksi yang bertanggung jawab atas suatu urusan spesifik dan membaawahi beberapa orang staf. Masing-masing pimpinan ini menjadi pengawas

terhadap setiap bawahan langsungnya sehingga setiap kepala seksi mengawasi stafnya dalam menjalankan pemerintahan distrik secara spesifik sesuai urusan yang dipercayakan. Sekurang-kurangnya suatu distrik memiliki 3 (tiga) seksi. Semua kepala seksi ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Distrik melalui Sekretaris Distrik. Begitu juga setiap Kepala Sub Bagian. Dan sebagai pucuk pimpinan, Kepala Distrik mengawasi setiap satafnya melalui Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Jika sistem pengawasan di distrik berjalan sesuai tatanan ini maka dapat dipastikan bahwa pengawasan dapat berjalan dengan baik dan dapat memastikan tingginya kinerja pemerintahan yang dihasilkan.

Distrik Sorong Barat Kota Sorong adalah sebuah Distrik hasil pemekaran pada wilayah administrative Kota Sorong yang telah menetapkan visi pemerintahannya yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Yang Damai dan Maju Dengan Pembinaan dan Pelayanan yang Optimal". Penetapan visi Pemerintah Distrik Sorong Barat ini telah menentukan tujuan bagi aktivitas pemerintahan dari Distrik Sorong Barat yang secara birokratis dikelola oleh 18 orang Pegawai Negeri Sipil yang dikeplai oleh seorang Kepala Distrik. Dari telaah visinya maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Distrik Sorong Barat sedang berupaya menghadirkan suatu pemerintahan yang dapat membina dan memberikan pelayanan yang optimal guna mewujudkan masyarakat Distrik Sorong Barat yang damai dan maju.

Berdasarkan pengamatan awal terhadap pemerintahan yang dijalankan Pemerintah Distrik Sorong Barat dan pendapat umum yang beredar di masyarakat keempat Kelurahan di wilayah Distrik Sorong Barat, adalah kedamaian kehidupan bermasyarakat yang majemuk dirasakan masih belum stabil, dan masyarakat menilai pemerintah distrik belum dapat membina masyarakat dengan baik terbukti dengan masih banyaknya kasus-kasus tindak kekerasan akibat konsumsi minuman keras dan masih maraknya aksi pemalakan juga masalah kebersihan dan lingkungan hidup yang belum ditangani dengan baik.

Dengan adanya keluhan masyarakat yang berkaitan dengan kondisi kedamaian dan kenyamanan yang menjadi visi Pemerintah Distrik Sorong Barat maka dapat disinyalir bahwa fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah Distrik Sorong Barat belum berjalan dengan baik. Bertolak dari paparan latar belakang inilah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif dengan judul "Fungsi Pengawasan Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Sorong Barat Kota Sorong".

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Fungsi Pengawasan Pimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Distrik Sorong Barat Kota Sorong” ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana materi teliti yang berupa pengawasan Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, Kepala-kepala Sub Bagian dan Kepala-kepala Seksi merupakan pemimpin yang melakukan pengawasan kepada jenjang pegawai yang tepat berada dibawahnya secara penjenjang.

Dengan menimbang materi penelitian ini sebagai materi kualitatif yang perlu dijelaskan dengan penggambaran yang jelas melalui penelitian, maka hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, tindakan, perasaan, pengalaman, pengetahuan dan pandangan subyek penelitian, sehingga dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari realitas tersebut (Hamidi, 2005:70).

Dengan demikian maka peneliti harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada informan atau responden untuk menyampaikan pikiran, pandangan, perasaan, pengetahuan dan pengalamannya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Pembagian kerja sebagaimana tampak pada struktur organisasi Distrik Sorong Barat merupakan suatu strategi pelaksanaan pemerintahan yang diterapkan oleh Pemerintah Distrik Sorong Barat. Pembagian kerja ini dimaksudkan untuk memberikan spesifikasi tugas dan wewenang kepada setiap perangkat pemerintah distrik sehingga pelaksanaan maupun pengawasan terhadap setiap tugas dapat dilakukan dan dievaluasi dengan baik. Hal ini dapat memberikan gambaran akan berfungsi tidaknya struktur organisasi ini sebagai sebuah system pemerintahan. Pembagian kerja berdasarkan struktur organisasi turut memberikan gambaran akan jenjang kepemimpinan pada Pemerintah Distrik Sorong Barat, dan secara detil memberikan informasi tentang siapa pimpinan yang memberi perintah dan yang mengawasi pelaksanaan perintah tersebut dan siapa saja penerima perintah yang bertanggung jawab melaksanakannya dan memberikan laporan tentang pelaksanaannya kepada pimpinan selaku pemberi perintah atau pemberi tugas.

Deskripsi tentang pemerintahan yang sistematis sesuai pembagian tugas yang

mengacu pada struktur organisasi Distrik diperoleh peneliti dengan mewawancara kelima informan yang hasil wawancaranya telah direduksi dan disimpulkan sebagai berikut:

“Distrik Sorong Barat dengan komposisi pegawai yang terdiri dari 18 orang PNS yang rata-rata merupakan PNS yang telah berpengalaman dan berlatar pendidikan tinggi memungkinkan manajemen sumber daya manusia yang seimbang untuk melaksanakan tugas sesuai struktur organisasi, sehingga semua jabatan dapat terisi penuh. Dengan demikian maka segala spesifikasi tugas boleh dikatakan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan pengalaman kerja dan latar pendidikan yang sesuai dengan tugas yang diembankan menurut struktur organisasi memastikan baik Kepala Distrik, Sekretaris Distrik, Kepala-Kepala Sub Bagian maupun Kepala-Kepala Seksi dapat menjalankan fungsinya secara berimbang sebagai pemberi tugas, pemimpin pelaksanaan tugas maupun sebagai pengawas bagi staf dibawahnya yang menjalankan tugas tersebut. Selain itu pimpinan masing-masing sub bagian dan seksi mengerti dan melaksanakan tugasnya untuk melaporkan pelaksanaan tugas maupun kendala pelaksanaan yang dihadapi kepada jenjang pimpinan yang lebih tinggi misalnya Sekretaris Distrik maupun Kepala Distrik. Hal ini secara teratur dilakukan dengan melaksanakan rapat internal sebulan sekali, sementara di setiap bagian atau seksi yang lebih kecil dilakukan setiap kali diperlukan. Ini berarti bahwa pengawasan dilakukan secara terpimpin bukan sesuka hati melainkan teratur sesuai garis perintah yang dianut.”

Dari rangkuman hasil wawancara dengan kelima informan diatas memberikan gambaran bahwa meskipun Kepala Distrik merupakan pucuk pimpinan pada Kantor Distrik Sorong Barat namun beliau sangat menghargai wewenang yang telah dipercayakan kepada bawahannya yang memimpin setiap sub bagian maupun seksi untuk dengan leluasa menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasan. Kepala Distrik sendiri mengambil fungsi sebagai penghimpun segenap laporan dan pengambil keputusan berdasarkan laporan pimpinan dibawahnya.

Hasil wawancara diatas juga memberikan gambaran bahwa setiap pegawai bekerja secara terpimpin dan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab atau juga menyampaikan keluhan serta memohonkan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas yang diembannya.

Tugas utama dari pemerintah Distrik Sorong Barat sebagaimana dipaparkan dalam gambaran umum lokasi penelitian yaitu melaksanakan fungsi koordinasi dalam wilayah

pemerintahannya serta melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dapat diselesaikan atau ditangani oleh pemerintah kelurahan dalam wilayah Distrik Sorong Barat. Tugas utama pemerintah distrik ini menunjuk pada tugas-tugas yang memerlukan penanganan langsung dan memakan waktu yang tidak terlalu lama, maka pengawasan terhadap pelaksanaannya pada umumnya harus dilakukan terus menerus guna memastikan segalanya dapat berjalan baik dalam tempo yang tersedia.

Deskripsi tentang waktu pelaksanaan pengawasan yang diterapkan oleh para pimpinan di Kantor Distrik Sorong Barat diperoleh melalui wawancara dengan kelima informan, yang telah disimpulkan sebagai berikut:

“Karena pekerjaan dilakukan secara spesifik maka pekerjaan juga dapat dilakukan secara terfokus. Tugas-tugas ini umumnya adalah tugas-tugas koordinasi dan pelayanan publik yang tidak memakan banyak waktu dan hasilnya harus sesegera mungkin didapatkan, oleh karena itu selaku pengawas, para pimpinan selalu melakukan pengawasan secara terus menerus guna memastikan tuntasnya koordinasi, perolehan informasi, terselenggaranya kegiatan dan pelayanan public serta terbitnya dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai pimpinan dari sub bagian dan seksi hal ini dilakukan secara terus menerus, sedangkan selaku Kepala Distrik pengawasan dilakukan secara terus menerus melalui Sekretaris Distrik dan Kepala sub bagian maupun seksi sedangkan pengawasan berkala dilakukan melalui rapat evaluasi internal distrik yang dilakukan oleh Pemerintah Distrik sebulan sekali atau setiap kali diperlukan guna mengevaluasi kinerja keseluruhan struktur organisasi. Hal ini oleh dipandang penting karena sebagai suatu system kadang informasi dari suatu seksi dibutuhkan untuk melakukan tugas dari suatu sub bagian dan sebaliknya.”

Disamping simpulan hasil wawancara di atas, hasil observasi peneliti terhadap pelaksanaan pengawasan pimpinan terhadap bawahan dalam melaksanakan pekerjaan menemukan beberapa fakta yang teramat sebagai berikut:

- 1) Setiap pegawai bekerja sesuai bidang tugasnya
- 2) Masing-masing Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi mengerti dan memahami betul urusan kerja yang dipimpinnya.
- 3) Hubungan koordinasi sejauh antara sub-sub bagian dan seksi-seksi berjalan dengan harmonis
- 4) Pimpinan Sub Bagian maupun Seksi menjadi sumber informasi utama dari setiap

bagian yang dipimpinnya dan jika diperlukan maka informasi lebih lanjut diperoleh dari Sekretaris Distrik maupun Kepala Distrik melalui pimpinan.

- 5) Pengawasan terus menerus memungkinkan tidak adanya penundaan pekerjaan atau mendorong efektivitas kerja pegawai dan penyelesaian masalah yang dihadapi sesegera mungkin.
- 6) Setiap staf menyadari bahwa pekerjaannya diawasi namun tetap dapat bekerja dengan nyaman sebagai bukti kesadaran pentingnya sebuah pengawasan
- 7) Pengawasan para pimpinan dilakukan tanpa mengintimidasi staf dalam melaksanakan tugasnya
- 8) Pertemuan-pertemuan evaluasi dihadiri dengan sangat disiplin oleh pegawai.
- 9) Suasana kerja sangat harmonis.

Selanjutnya peneliti mewawancarai para informan tentang tanggapannya terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan di Kantor Distrik Sorong Barat. Adapun kesimpulan hasil wawancara kelima informan adalah sebagai berikut:

“Pimpinan yang melakukan pengawasan menganggap pengawasan yang dilakukannya sebagai suatu alat koreksi terhadap dirinya sendiri dalam hal kedisiplinan, komitmen terhadap pelayanan public, kepemimpinan yang diterapkannya tetapi juga kapasitas pribadinya sebagai pemimpin di satu sisi namun di sisi lain sebagai abdi Negara secara umum, bahkan sisi socialnya sebagai sorang manusia dan sisi keimanannya kepada Tuhan. Sementara elaku staf atau bawahan, para pegawai menganggap pengawasan terhadap dirinya dalam melaksanakan tugas merupakan hal yang sudah seharusnya. Bagi mereka ini harus diterima secara positif guna perbaikan kinerjanya karena dengan ada pengawasan, informasi yang diperlukan dengan cepat diperoleh, pemecahan terhadap masalah yang timbul segera tertangani, di lain pihak pengawasan mendorong mereka untuk melayani masyarakat dengan bertanggung jawab bahkan dengan pengawasan setiap staf menilai kekurangan dan kemajuan yang diraihnya. Masalah ditegur, harus diterima lapang dada, karena ada yang salah atau menyimpang. Sejauh ini pengawasan tidak memberikan tekanan fisik, maupun moral yang mengganggu pekerjaan malah sebaliknya sangat memotivasi para pegawai. Dengan pengawasan setiap orang merasa punya andil terhadap keberhasilan bersama yang dicapai Distrik Sorong Barat.”

## B. Pembahasan

Pengawasan sebagaimana dijelaskan oleh Kumorotomo (2009:356) mengedepankan 4 (empat) hal pokok yaitu: tidak mencari-cari kesalahan, merupakan proses yang berkelanjutan, memungkinkan terjadinya perbaikan atau koreksi, dan bersifat mendidik dan dinamis. Bertolak dari ulasan hasil penelitian dikaitkan dengan pendapat Kumorotomo di atas maka pengawasan pimpinan yang diterapkan di Kantor Distrik Sorong Barat telah memenuhi keempat hal penting dimaksud.

Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan pimpinan yang dilakukan langsung oleh pimpinan sub bagian dan seksi dan pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Kepala Distrik melalui Sekretaris Distrik maupun pimpinan su bagian dan seksi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Distrik Sorong Barat telah dilakukan dengan penuh kesadaran akan pentingnya menyeraskan pemberian perintah atau penugasan dengan pengawasan pelaksanaan tugas atau perintah tersebut. Dinama pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa tugas atau perintah yang diberikan dilaksanakan pegawai sesuai dengan rencana penugasan serta mencapai tujuan pemberian tugas atau perintah tersebut serta terselesaikan tuntas tepat waktu. Disamping itu pengawasan pimpinan pada Kantor Distrik Sorong Barat dilakukan sebagai bentuk pengantisipasi terhadap kendala atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan perintah atau tugas serta memungkinkan pemecahan masalah terhadap hal-hal tersebut.

Pengawasan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga dalam prosesnya system pengawasan ini menjadi suatu pola peningkatan kapasitas dan kinerja pegawai karena bermuatan mendidik dan mengoreksi kesalahan bukan hanya mencari kesalahan. Selain itu penelitian ini juga mengungkap bahwa pengawasan pimpinan yang dilaksanakan di Kantor Distrik Sorong Barat ini menjadi suatu alat introspeksi bagi pimpinan sendiri akan kapasitas diri, pola kepemimpinan, cara berkomunikasi maupun ketanggapannya akan masalah yang muncul. Jadi melalui pengawasan pimpinan sebagai suatu bentuk pengawasan internal pada Kantor Distrik Sorong Barat. Baik pimpinan sebagai pengawas maupun bawahan atau pegawai atau staf sebagai pihak yang diawasi keduanya memperoleh manfaat besar dalam perbaikan kinerja pribadi maupun institusi ini secara organisasional.

Hal ini membuktikan bahwa pengawasan pimpinan yang diterapkan dengan menghormati struktur organisasi dan pembagian kerja serta

wewenang setiap pimpinan pada tingkatan yang berbeda-beda berfungsi dengan baik dalam mempengaruhi kinerja pegawai maupun kinerja organisasi pada Kantor Distrik Sorong Barat. Peningkatan kinerja pribadi setiap pegawai pada lingkup tugasnya di seksi atau sub bagianya akan mempengaruhi peningkatan kinerja organisasi Distrik Sorong Barat. Dengan demikian maka pengawasan pimpinan yang diperlukan oleh Pemerintah Distrik Sorong Barat menurut SANRI merupakan bentuk Pengawasan Melekat atau WASKAT.

Kajian akan fungsi pengawasan pimpinan ini juga membuktikan bahwa setiap pimpinan pada Kantor Distrik Sorong Barat yang bertindak sebagai oknum pengawas memahami dengan benar materi awasan serta objek awasannya karena pembagian tugas menurut struktur organisasi pada Kantor Distrik Sorong Barat telah memenuhi kaidah manajemen sumber daya manusia karena setiap pimpinan merupakan pegawai berpengalaman dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan urusan yang diembankan kepadanya.

Menyangkut berbagai keluhan masyarakat yang dijadikan interpretasi awal penelitian ini akan minimnya kinerja pegawai pada Kantor Distrik Sorong Barat tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Distrik Sorong Barat, melainkan lebih kepada peran dari perangkat pemerintah masing-masing kelurahan, yang oleh penerapan pengawasan internal yang dilakukan setiap pimpinan pada tingkat Distrik Sorong Barat pada gilirannya akan terkoreksi baik. Selain itu partisipasi masyarakat juga menjadi kajian tersendiri di luar penelitian ini yang berkaitan dengan interpretasi awal tersebut.

## 4. KESIMPULAN

Pengawasan pimpinan pada Kantor Distrik Sorong Barat merupakan bentuk Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pemimpin sesuai struktur organisasi yang dianut, dilakukan secara berkelanjutan dan berfungsi sebagai upaya kontrol yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas diri, kemampuan, dan kinerja pribadi baik bagi pimpinan sebagai pengawas maupun pegawai sebagai pihak yang diawasi maupun pekerjaan sebagai materi awasan yang secara organisasional telah mempengaruhi kinerja organisasi secara positif.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afifudin, 2012. Pengantar Administrasi Pmbangunan. Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi. Alfabeta, Bandung.

- [2] Gomes, Faustino Cardoso, (2003), Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [3] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
- [4] Koontz, Harold dan Cyrill O'Donnell, (1964). Principles of Management. New York: McGraw-Hill.
- [5] Kumorotomo, Wahyudi , (2009), Etika Administrasi Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- [6] Mangkunegara, A.A.Anwar Prabu, (2009),Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [7] Manullang,M. (2008). Dasar-Dasar Management. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- [8] Moleong, Lexy J., 2011. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Karya, Bandung.
- [9] Siagian, Sondang P. 2007. Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi dan Strateginya. Bumi Aksara, Jakarta.
- [10] Srimulyo, Koko, (1999), Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Terhadap kinerja.
- [11] Sujamto, 1989. Norma & Etika Pengawasan. Sinar Grafika, Jakarta.
- [12] Undang Undang Nomor 23 Thaun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [13] Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.